

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Arti Penting Sektor Pertanian bagi Perekonomian Indonesia

Sektor pertanian di Indonesia masih dianggap penting bagi perekonomian Indonesia. Pentingnya sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia ini dapat dilihat dari aspek: penyediaan pangan, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, dan sumbangannya terhadap perolehan devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara pembiayaan sektor-sektor yang lain. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP-I), sektor pertanian ini bahkan dikatakan sebagai sektor yang tangguh karena memang terbukti bahwa sektor pertanian telah mampu untuk:

- a. Penghasil bahan pangan dan bahkan sejak tahun 1984 Indonesia mampu berswasembada beras.
- b. Penyedia lapangan kerja bahkan kini sektor pertanian masih menampung 49,3% dari jumlah angkatan kerja yang ada.
- c. Pendorong munculnya kesempatan berusaha dan bahkan pesatnya industripun juga sebagian besar berasal dari industri yang berbahan baku pertanian.
- d. Penyedia faktor produksi dan bahkan industri hulu seperti industri peralatan pertanian dan pupuk kini berkembang pesat karena berkembangnya sektor pertanian ini. (Soekartawi, 2002)

Hampir semua NSB mengandalkan sektor pertanian mereka untuk kebutuhan Negara mereka. Tentu saja ada perkecualian, misalnya Malaysia atau Saudi Arabia. Kedua Negara ini, yang kaya akan sumberdaya alam untuk ekspor (timah dan minyak) mempunyai cadangan devisa yang banyak untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan pangan mereka. Para petani di NSB tidak hanya memproduksi untuk kebutuhan mereka saja, mereka juga memproduksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Jika pangsa penduduk perkotaan terhadap penduduk keseluruhan meningkat, maka produktivitas para petani pun harus meningkat.

Sektor pertanian juga merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi moderen. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan berasal dari pendapatan. Di Negara-negara yang paling miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50 persen. Berarti separuh atau lebih dari produk nasional disumbangkan oleh sector nonpertanian, terutama industri dan perdagangan (jasa-jasa). Dan sektor-sektor ini merupakan penyumbang penting bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi. Namun demikian, bisa saja suatu Negara mengalami tingkat pembentukan modal yang tinggi tanpa didorong oleh sektor pertanian sama sekali. Korea selatan merupakan contohnya. Negara ini mengalami tingkat pembentukan modal yang sangat tinggi terutama sekali disebabkan oleh adanya bantuan luar negeri pada mulanya, dan akhir-akhir ini disebabkan oleh kenaikan keuntungan yang diperolehnya dari perkembangan sektor industri.

Konsep dasar tentang pertanian sebagai sektor yang paling penting didalam pembangunan ekonomi nasional dapat dilihat dalam pernyataan dari *Simatupang* dan *Syafa'at (2000)* sebagai berikut : sektor andalan merupakan tulang punggung (*backbone*) dan mesin penggerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin (*leading sector*) perekonomian nasional (hal.9). Menurut mereka, ada lima syarat yang harus dilihat sebagai kriteria dalam mengevaluasi pertanian sebagai sektor kunci dalam perekonomian nasional. Kelima syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategis, dalam artian esensial dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran dan tujuan daripada pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB) dan kesempatan kerja, peningkatan devisa Negara, pembangunan ekonomi daerah, dan sebagainya.
2. Tangguh, yang berarti unggul dalam persaingan baik di dalam negeri maupun di pasar global dan mampu menghadapi gejolak ekonomi, politik, maupun alam. Pertanian sebagai sektor andalan harus memiliki keunggulan kompetitif, berbasis pada kemampuan sendiri (domestik) atau kemandirian dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis (sosial, ekonomi, politik, alam).
3. Artikulatif, yang artinya pertanian sebagai sektor andalan harus memiliki kemampuan besar sebagai dinamisator dan fasilitator bagi pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya dalam suatu spektrum yang luas.

4. Progresif, yang berarti pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa menimbulkan efek-efek negative terhadap kualitas lingkungan hidup. Hanya jika output pertanian tumbuh positif dan berkelanjutan, sektor tersebut dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan bagi perekonomian nasional.
5. Responsif, dalam arti pertanian sebagai sektor andalan mampu memberi respons yang cepat dan besar terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah

4.2. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Pembangunan seimbang itu diartikan pula sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam: (i) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar, dan (ii) memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksi.

Sementara itu analisa Lewis (dalam Arsyad, 1992 : 257-259), menunjukkan bahwa perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor

akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis, menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian terjadi invasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah : (i) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian, (ii) produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi, dan (iii) kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (*Term of Trade*) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi.

Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian maka akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang tersebut. Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak

berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.

Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992: 262 – 270) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (i) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang, (ii) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, dan (iii) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Dengan demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara pilihan pengganti (*substitution choice*) dan cara pilihan penundaan (*postponment*)

choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan.

Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau *Social Overhead Capital* (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau *Directly Productive Activities* (DPA). Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu: (i) pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut, (ii) pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan, dan (iii) pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan. Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika (i) sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya sejumlah tertentu bisa dicapai tingkat produksi yang maksimum, (ii) untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum. Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.

4.3. Investasi dan Penentuan Tingkat Upah

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.

Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus pula.

Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (Azis, 1985 : 15).

Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakteristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produksi. Secara historis, perbedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya *bergaining position* antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatkan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Jika tanah dan modal dapat diperjualbelikan di pasar sedangkan tenaga kerja tidak demikian. Namun demikian, hal ini tidak cukup menjadikan alasan bagi aliran ekonomi utama (*mainstream economy*) untuk melakukan perbedaan analisis terhadap faktor produksi lain.

Jika kemudian tenaga kerja dibedakan dengan *entrepreneur* (wirausaha) adalah lebih didasarkan atas perbedaan karakter intrinsik yang ada pada kedua faktor produksi tersebut. *Entrepreneur* dipandang sebagai tenaga kerja yang berani mengambil resiko, sehingga ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan resiko yang diambil dan nilainya belum tentu tetap.

Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja.

4.4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Pandangan *mainstream economy* terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*derived demand*), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.

Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusahaan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (*Value Marginal Product of Labor, VMPL*)

VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

Analisis tradisional terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (*leisure*). *Leisure* dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangkan pendapatan secara langsung, seperti istirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan.

Ekonom memandang bahwa *leisure* merupakan kebutuhan pokok manusia, sementara upah juga merupakan barang normal (semakin banyak semakin disukai). Tenaga kerja dianggap tidak suka pada jam bekerja namun suka pada pendapatan dan *leisure*. Oleh karena itu penawaran tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat upah, namun karena *leisure* juga diinginkan oleh tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja bersifat *backward bending* (bengkok ke belakang). Pada tingkat upahnya meningkat karena ingin mempertahankan jam *leisure*-nya (untuk mengurus keluarga dan sebagainya).

4.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Manusia sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja akan meningkat jika output meningkat. Hubungan antara kesempatan kerja dan output dapat dilihat berdasarkan rasio

kesempatan kerja - output dan angka elastisitas kesempatan kerja. Model-model pertumbuhan output dan kesempatan kerja terbagi dua yaitu pertumbuhan output dengan kesempatan kerja yang bertentangan, dan yang saling mendukung. Model yang saling bertentangan disebabkan oleh karena output maksimum tercipta oleh adanya industri yang padat modal, sedangkan untuk yang saling mendukung dapat diilustrasikan dalam skema berikut:

*Alasan kesempatan kerja \uparrow \rightarrow pendapatan \uparrow \rightarrow permintaan barang konsumsi \uparrow
 \rightarrow memerlukan industri yang padat karya sehingga kesempatan kerja \uparrow*

4.6. Teori-teori Pertumbuhan.

4.6.1 Teori Klasik

Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur berdasarkan dari jumlah produksi barang dan jasa (output) yang dihasilkan. Angka yang biasanya digunakan untuk mengukur jumlah output yang dihasilkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang diukur dengan harga konstan dimana pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. Tujuan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk melihat kondisi perekonomian. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi (sektoral) atau daerah asal produksi (regional). Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana diukur dengan PDB per kapita, kesempatan kerja yang tersedia dimana semakin besar jumlah output yang dihasilkan maka akan memperluas kesempatan kerja yang ada, perbaikan distribusi pendapatan dimana pertumbuhan ekonomi akan memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi sebagai pijakan untuk tahap kemajuan ekonomi selanjutnya.

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Q = f (K, L, T, U, M, W, I)$$

Dimana:

Q = *Output atau PDB*

K = *Barang Modal*

L = *Tenaga Kerja*

T = *Teknologi*

U = *Uang*

M = *Manajemen*

W = *Kewirausahaan (Entrepreneurship)*

I = *Informasi*

salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang disebutkan adalah faktor tenaga kerja. Sampai saat ini, terutama di negara-negara berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Peningkatan jumlah tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Hal ini sangat bergantung pada seberapa cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return* (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR tersebut dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja dan keterkaitannya dengan teknologi produksi. Sayangnya, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam

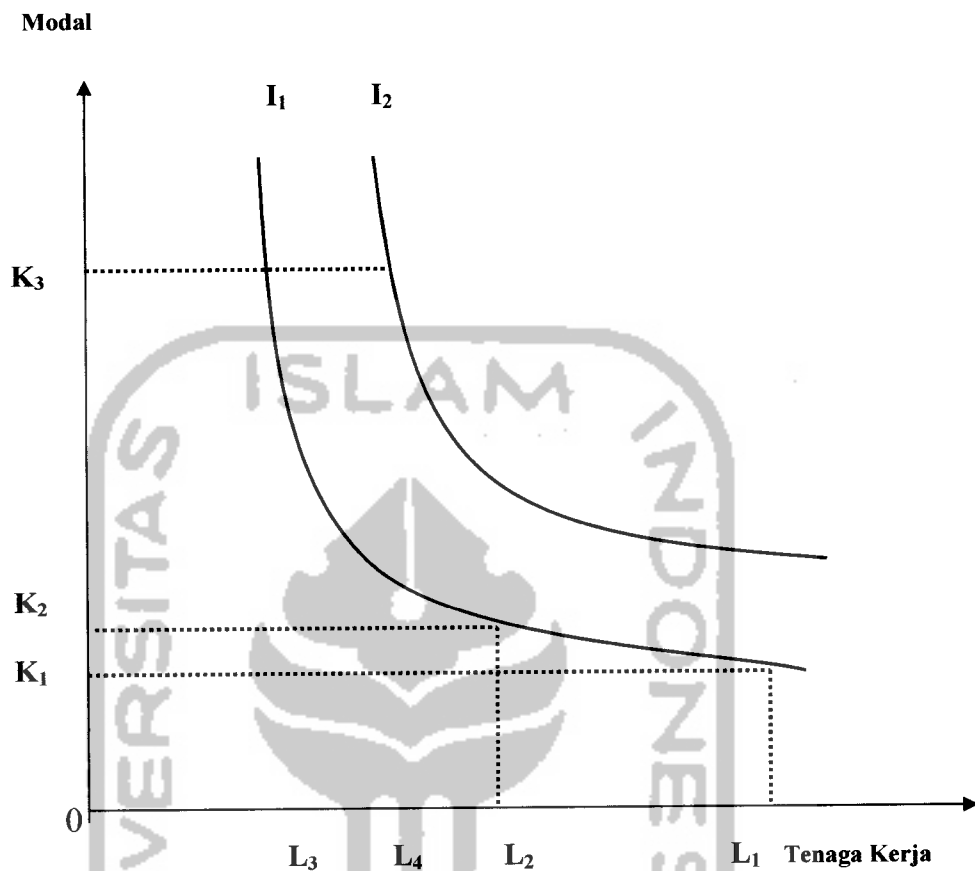
proses produksi akan semakin berkurang seiring dengan kemajuan teknologi produksi. Sehingga akan muncul trade-off antara efisiensi-produktivitas dan kesempatan kerja. Harga dari efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan teknologi padat modal ialah semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia. (Rahardja dan Manurung, 2001).

4.6.2. Teori Neo Klasik (Solow-Swan)

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini berdasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. (Arsyad, 1997 : 57). Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal output (capital output ratio = COR) bisa berubah. Dengan kata lain untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sifat teori pertumbuhan Neo Klasik bisa digambarkan seperti pada gambar 4.1. fungsi produksinya ditunjukkan oleh I_1 , I_2 dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja.

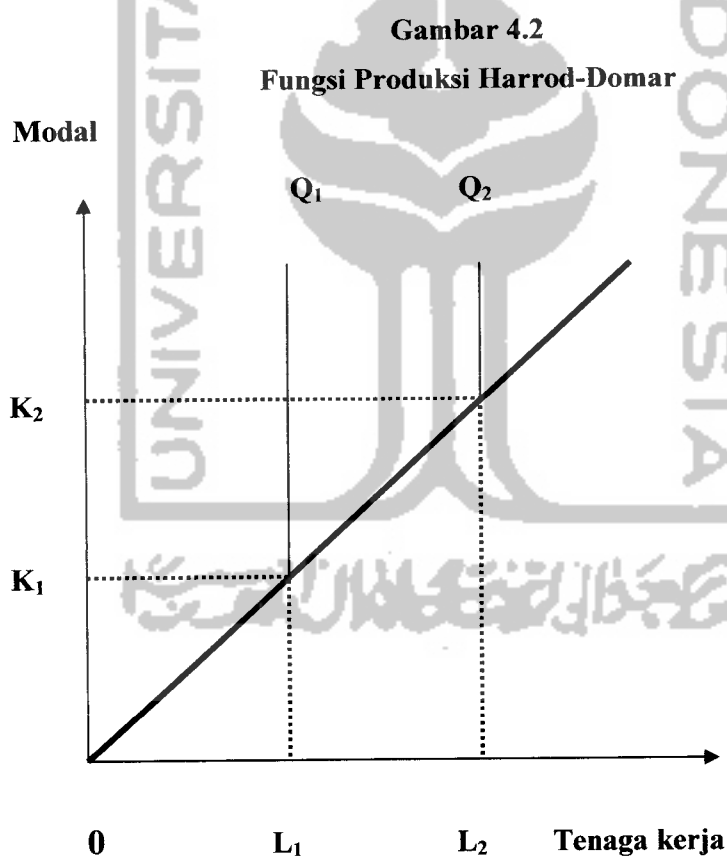
Gambar 4.1
Fungsi Produksi Neo Klasik



4.6.3. Teori Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk

menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio-output tersebut. Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak produktif). Untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga L_1 , dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2 , misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K_2 , sifat teori ini bisa digambarkan seperti pada gambar 4.2. (Arsyad, 1997).



4.6.4. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan karena kewirausahaan pada pengusaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pengusaha sebagai kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru atau inovator. (Rahardja dan Manurung, 2001). Dalam hal ini, peranan inovator bukan kepada kapitalis melainkan pengusaha yang tidak sekedar memiliki kemampuan manajerial biasa melainkan dapat memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru (Jhingan, 1990). Sekalipun demikian banyak kritik yang dilontarkan kepada Schumpeter karena analisisnya yang berbau provokatif mengenai peralihan dari kapitalisme ke sosialis. Di samping itu ada kritik yang juga gencar dilontarkan kepadanya, bahwa dalam memulai proses pembangunan dan mampu untuk berdiri sendiri, yang diperlukan bukan hanya inovasi saja tetapi kombinasi dari beberapa faktor seperti struktur organisasi, praktek bisnis, tenaga yang terampil dan nilai-nilai serta sikap yang tepat. Dalam prakteknya di negara-negara berkembang, menurut Wallich (dalam Jhingan, 1990) tidak pada inovasi, tetapi asimiliasi atas inovasi yang ada. Karena pengusaha di negara yang belum berkembang tidak berada pada posisi berinovasi, malahan mereka mengambil inovasi yang terjadi di negara-negara maju. (Arsyad, 1997).

4.7. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan barang-barang modal. Barang atau stok modal terdiri dari pabrik, mesin dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan untuk proses produksi. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang telah lama aus dan perlu didepresiasi.

Dalam prakteknya, Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran atau perbelanjaan.

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan Pendapatan Nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi netto. Investasi netto bertujuan untuk memperbesar kemampuan perusahaan (dari perekonomian secara keseluruhan) untuk memproduksi barang (mempertinggi kapasitas produksi).

Tujuan investasi yang dilakukan para penanam modal berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen (rumah tangga), yang membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, tetapi penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali peranannya dalam menentukan investasi yang dilakukan para pengusaha.

4.7.1. Kebijakan Pemerintah dibidang Investasi

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan investasi dengan cara menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan memberi kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada dunia usaha. Dalam laporan tahunan, kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi lebih dititikberatkan kepada penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan dan fasilitas. Dalam prosedur perijinan baru, beberapa persyaratan penanam modal telah dihapuskan antara lain : bukti kewarganegaraan bagi keturunan asing, jaminan

pemasaran ekspor dan laporan keuangan yang diperiksa akuntan publik. Disamping itu pemerintah juga melakukan usaha promosi yang lebih efektif.

Sejalan dengan itu seperti yang tercantum dalam uu no. 6 tahun 1968, bahwa kesempatan menanam modal lebih diperluas sehingga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dimana kesempatan untuk menikmati fasilitas PMDN tidak hanya terbuka untuk perseroan terbatas, tapi juga kepada Badan Hukum lain seperti Koperasi, PT persero, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, CV, Firma dan Perseorangan.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pengembangan investasi antara lain sebagai berikut :

- a. Keppres no 97/1993 tentang tata cara penanaman modal, sebagai pengganti keppres no 93/1992. keputusan ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan tata cara perijinan di tingkat daerah yang meliputi lokasi, hak atas tanah IMB dan sebagainya.
- b. Keputusan menteri perdagangan no. 311/kp/x/1993, tentang penyederhanaan impor mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru, dapat dilakukan oleh perusahaan pemakai langsung atau perusahaan pemakai langsung atau perusahaan rekondisi yang telah memperoleh ijin usaha industri.
- c. Sk presiden no. 54 tahun 1993, tentang pengurangan Daftar Negative Investasi (DNI) yaitu daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal, secara keseluruhan pengurangannya adalah dari 51 bidang usaha menjadi 33 bidang usaha. Pengurangan ini untuk memberikan

kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi para penanam modal untuk melakukan investasi.

4.8. Penanaman Modal Asing (PMA)

Untuk membangun suatu perekonomian harus memiliki Social Overhead Capital yaitu proyek-proyek raksasa yang diperlukan untuk memperlancar bisnis dan perdagangan seperti jalan raya, rel kereta api, proyek irigasi dan bendungan, serta sarana kesehatan umum. Semua ini memerlukan investasi yang sangat besar yang cenderung bersifat sekaligus. Tidak ada seorang pun atau perusahaan kecil yang mampu membangun suatu sistem jalan raya. Tidak ada perusahaan yang bisa berharap mendapatkan laba jika dana yang diperlukan tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Disinilah manfaat proyek investasi skala besar yang kesemuanya itu berasal dari luar negeri yang dapat menyebar ke seluruh perekonomian.

4.9. Tenaga Kerja

Setiap usaha pertanian yang dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam analisis ketenagakerjaan dibidang pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Tenaga merupakan input yang penting dalam kegiatan produksi, baik itu di bidang pertanian atau bidang lainnya. Sehingga penggunaan tenaga kerja itu diharapkan bisa maksimal dan sesuai yang diharapkan.

4.10. Otonomi Daerah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

4.11. Hubungan variabel independent dengan variabel dependen.

4.11.1. Hubungan antara PMDN terhadap PDB sektor pertanian

Investasi merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi. Adanya investasi dapat menaikkan kapasitas produksi dan juga pendapatan. Sebagai modal pembangunan investasi hendaknya dilakukan pada proyek-proyek yang dapat diharapkan memberi hasil tertinggi atau investasi pada proyek-proyek yang paling menguntungkan.

4.11.2. Hubungan antara PMA terhadap PDB sektor pertanian

Dengan masuknya investasi dari luar negeri menjadikan perubahan teknologi dan inovasi. Disamping faktor kependudukan, sumberdaya alam dan pembentukan modal yang sangat fundamental. Manfaat lainnya adalah bisa menarik keuntungan dengan mengandalkan pada ketrampilan teknik negara-negara yang lebih maju.

4.11.3. Hubungan antara Tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian

Tenaga kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan berproduksi. Tanpa adanya tenaga kerja, mungkin produksi tidak akan dapat dilakukan. Namun tenaga kerja bukan merupakan satu-satunya faktor berproduksi, masih ada faktor yang lain. Misalnya, sumber daya alam, modal dan teknologi. Faktor-faktor produksi tersebut sangat erat sekali hubungannya. Jika salah satu tidak ada, mungkin kegiatan produksi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga diperoleh hasil output yang maksimal.

4.11.4. Hubungan antara kebijakan otonomi daerah (Dummy Variabel) terhadap PDB sektor pertanian

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah. Indonesia sebagai negara agraris yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat potensial dan mampu memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia.

Dengan desentralisasi setiap daerah artinya masyarakat di daerah yang bersangkutan dapat menetapkan strategi pengembangan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi dan kepentingan mereka. Strategi pembangunan tidak lagi menjadi sebuah rencana dan rancangan yang ditentukan oleh segelintir orang saja tetapi merupakan sebuah gerak bersama yang penuh keragaman. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya secara lebih besar bagi lagi terutama kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB atau pendapatan nasional.

4.12. Hipotesis

Agar penelitian tidak menyimpang dari judul, arah dan tujuan penelitian, maka ditarik hipotesa sebagai berikut :

1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PMA (Penanaman Modal Asing), tenaga kerja, kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
2. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia
3. PMA (Penanaman Modal Asing) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
4. Tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
5. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.